

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seiring dengan berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akuntabilitas untuk wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintahan menjadi suatu tuntutan umum. Orientasi dibangunannya sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Kepemerintahan yang baik atau suatu penyelenggaraan manajemen serta pembangunan yang solid dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari adanya salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan kerangka dan legal kerja politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha, ini sering diartikan sebagai *good governance* (Mardiasmo, 2002).

Meningkatnya keinginan masyarakat terhadap terselenggaranya pemerintahan yang baik, mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk menerapkan akuntabilitas publik. Kewajiban suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya diartikan sebagai akuntabilitas. Di Indonesia, salah satu bentuk konkrit untuk terwujudnya akuntabilitas keuangan negara dan transparansi adalah dengan adanya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berupa

laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan dari sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu entitas (Diani, 2014).

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengungkapkan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah pengukuran normatif yang perlu terwujudnya dalam informasi akuntansi sehingga dapat terpenuhi segala tujuannya. Karakteristik kualitatif antara lain berupa : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Untuk memenuhi karakteristik tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak mungkin terlepas dari adanya peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan.

Pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah juga akan sangat penting dalam sebuah laporan keuangan sebagai informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Faktor lain dari pengaruh kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem tersebut dituntut untuk memiliki keahlian atau kemampuan akuntansi yang memadai dalam menghasilkan informasi yang andal. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan penting untuk perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian entitas yang bersangkutan.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk diberikannya keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui mengamankan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, kegiatan yang efektif dan efisien, dan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Perlunya pengendalian intern diharapkan mampu mendeteksi atau mencegah terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberi perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman sabotase atau penyelewengnya sistem. Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat terpenuhinya asas ketertiban yang merupakan cermin dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor lain dari pengendalian internal akuntansi adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah yang telah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi ini membantu membantu proses mengidentifikasi, proses mencatat dan melaporkan keuangan dan anggaran, mengukur dan melaporkan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang kemudian menjadikan sebagai informasi yang dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi yang didapat diharapkan membantu pihak yang berkepentingan dalam pengidentifikasian suatu masalah, penyelesaian serta pengevaluasian, sehingga informasi yang didapatkan harus informasi yang berkualitas. Menyangkut tentang pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan nilai informasi pelaporan keuangan, didasarkan oleh semakin meningkatnya total APBD dan APBN dari tahun ketahun.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah peran internal audit. Peran internal audit adalah memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Disebutkan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan cara konsultasi

yang dirancang untuk meningkatkan operasi organisasi dan memberikan nilai tambah (*Institute Of Internal Auditor*, 1999 dalam Yuliani, 2010). Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan pengelolaan organisasi, menerapkan pendekatan yang sistematis juga disiplin untuk meningkatkan serta mengevaluasi efektifitas pengelolaan resiko kecukupan kontrol. Pemerintah daerah harusnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari APBD setempat.

Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti tentang kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit memiliki hasil penelitian yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hasil pemahaman standar akuntansi pemerintah, dan peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuanagn daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Roshanti (2014) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Yendrawati (2013) menyatakan bahwa hasil penelitian tentang kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang belum konsisten tersebut mungkin dikarenakan adanya perbedaan responden yang digunakan.

Berdasarkan uraian diatas yang masih belum konsisten dan masih terbatasnya penelitian di bidang pemerintahan khususnya di Kota Semarang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Alasan penelitian ini adalah, ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu organisasi perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan dengan baik dan jujur serta dilihat dari sejauh mana pemahaman yang dimiliki oleh staff akuntansi maupun tata usaha keuangan di pemerintah daerah, dan diikuti dengan pengawasan pada penyusunan laporan keuangan agar dapat dikatakan andal dan relevan. Selain itu, ada banyaknya kasus penyimpangan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga menjadi faktor dilakukannya kembali penelitian ini, khususnya pada pemerintah daerah Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sapitri dkk (2015). Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah sebagai adanya penambahan variabel independen. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah dan peran internal audit sebagai variabel penambahnya. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel independen berupa

kapasitas sumber daya manusia, pengendalian internal akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Obyek penelitian ini adalah pada organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah Kota Semarang yang sampelnya diambil dari pegawai-pegawai dari pemerintah Kota Semarang. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, menggunakan obyek Koperasi Simpan Pinjam yang terdapat di Kecamatan Buleleng. Kota Semarang merupakan wilayah industri dan wisata yang dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup signifikan sehingga dalam penegelolaan laporan keuangan daerahnya harus dilakukan dengan akuntabel. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015.

Dari uraian diatas, topik tersebut menarik untuk dijadikan sebagai judul penelitian. Oleh karena itu beradarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini mengambil judul : **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sangat diperlukan publik untuk mengetahui akuntabilitas terhadap pemerintah daerah. Namun kenyataan di lapangan kualitas informasi LKPD secara umum masih lemah padahal telah dilakukan reformasi manajemen keuangan negara maupun daerah oleh pemerintah. Dengan adanya usaha pemerintah tersebut bertujuan untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan kriteria kualitas laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Sehingga harus diteliti lagi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah pengendalian internal akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah peran audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengendalian internal akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian internal akuntansi, pemanfaatan teknologi



informasi, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atas pemahaman dan pengembangan teori khususnya tentang pemahaman standar akuntansi pemerintah, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian internal akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai. Serta bertujuan untuk menambah daftar pustaka dalam lingkungan akademis.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan, sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintah, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian internal akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan agar dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang oleh pemerintah daerah maupun oleh pembaca.